



**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2025**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	13.096
	a. Wajib LHKPN	282
	b. Tidak Wajib LHKPN	12.814
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	282
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	12.084
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	1.012
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	1.012

Keterangan :

1. Sumber data Rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 berdasarkan hasil pengolahan data oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.
2. Kendala yang dihadapi pada rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan antara lain:
 - a. Sinkronisasi nomor NPWP (terdapat ASN yang memiliki nomor NPWP tidak valid pada database Kawil DJP Bali)
 - b. Terdapat ASN yang terdaftar di luar wilayah Kanwil DJP Bali, sehingga dibutuhkan kordinasi lebih lanjut ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan validasi data pelaporan SPT Tahunan ASN bersangkutan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, proses tindak lanjut dalam validasi/pemenuhan data pelaporan SPT Tahunan akan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR
I Wayan Sugiada, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651231 198603 1 175



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

